

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi adalah rencana yang dipikirkan dengan matang untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi merupakan proses menentukan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang dari sebuah organisasi, lembaga, atau perusahaan. Dalam proses ini, juga dibuat cara atau upaya yang efektif agar tujuan tersebut bisa tercapai dengan baik.

Menurut Bryson (2018) strategi bisa dipahami sebagai rangkaian dari tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau distribusi sumber daya yang menjelaskan cara sebuah organisasi beroperasi, apa yang akan mereka lakukan, dan alasan di balik tindakan tersebut. Dengan demikian, strategi berfungsi sebagai perpanjangan misi untuk menghubungkan organisasi (atau komunitas) dengan lingkungan sekitarnya. Biasanya, strategi dirancang untuk menangani masalah strategis, dan strategi ini menguraikan bagaimana organisasi merespons pilihan kebijakan yang mendasar.

Menurut Chandler dalam Salusu (2015) strategi adalah langkah yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Pada organisasi publik, organisasi nonprofit dan organisasi bisnis di

dalam menjalankan aktivitasnya memiliki landasan yang tidak terlalu jauh berbeda. Selain dari organisasi publik, organisasi nonprofit dan organisasi bisnis sama-sama memiliki persamaan asas, prinsip umum dan unsur manajemen, hal-hal lain yang dianggap sama pula, bahwa dari ketiga bentuk organisasi ini memiliki persamaan dalam hal: Sama-sama menyatakan pelayanan sebagai fungsi utama, memiliki karakteristik publik dan privat, melayani lingkungan, memiliki peluang dan tantangan, memiliki pertanggung jawaban (*accountability*), memiliki karakteristik struktur maupun fungsi.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, strategi adalah suatu rencana yang disusun secara matang dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi mencakup penetapan formulasi dan sasaran jangka panjang, penentuan pemilihan tindakan yang tepat, serta alokasi sumber daya secara efektif. Dalam konteks organisasi atau lembaga, strategi juga melibatkan perencanaan dan pengelolaan yang tepat dengan sasaran agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.

2.1.2 Tipe-Tipe Strategi

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sehingga tujuan dari suatu lembaga dapat diwujudkan sesuai dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya. Jenis-jenis rencana yang diterapkan dalam organisasi bisa berbeda-beda, ada beragam metode yang digunakan dalam sebuah lembaga untuk mencapai tujuan organisasi

atau instansi pemerintah yang telah ditentukan. Menurut Kooten dalam Salusu (2015), tipe-tipe strategi tersebut meliputi:

a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan penetapan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif strategis. Batasan yang diperlukan terkait apa yang perlu dilakukan dan bagi siapa, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

b. *Program Strategy* (Strategi Program)

Strategi ini lebih fokus pada dampak-dampak dari suatu program tertentu. Contohnya, penting untuk memahami apa akibat yang ditimbulkan jika suatu program tertentu diluncurkan atau dikenalkan apa konsekuensinya bagi tujuan organisasi hal tersebut dilakukan agar tidak muncul kendala yang tidak diinginkan.

c. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi dukungan sumber daya baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya penting ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya penting yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan lainnya.

d. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Dalam strategi kelembagaan, kemampuan instansi untuk menghadapi suatu isu berlandaskan pada sejauh mana mereka dapat

memanfaatkan secara efektif elemen-elemen kelembagaan (aturan, tanggung jawab, dan kewenangan) yang dimilikinya untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan.

2.2 Strategi Politik

2.2.1 Pengertian Strategi Politik

Menurut Yanto (2022) strategi politik adalah cara-cara, rencana, atau ide yang digunakan untuk memenangkan pertandingan dalam proses pemilihan. Tujuan dari strategi ini biasanya adalah mendapatkan kekuasaan melalui pemilihan baik Pemilu dan Pilkada.

Strategi politik merupakan suatu kerangka rencana dan langkah-langkah yang disusun secara sistematis oleh aktor politik untuk mencapai tujuan atau cita-cita politik tertentu. Strategi politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana memenangkan persaingan dalam proses pemilihan, tetapi juga berperan penting dalam konteks pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan, pemberlakuan peraturan perundang-undangan, serta pembentukan dan penguatan kelembagaan birokrasi. Dengan demikian, strategi politik menjadi instrumen penting dalam memperoleh, mempertahankan, dan menjalankan kekuasaan secara efektif dan terarah.

Menurut Schroder (2010) seorang pakar strategi politik yang mempopulerkan strategi politik. Menurutnya, strategi politik adalah kerangka dari langkah-langkah atau rencana yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan atau cita-cita politik.

2.2.2 Jenis-Jenis Strategi Politik

Dalam memilih dan menentukan pilihan yang terbaik dan tepat, kita harus punya kemampuan untuk mengenali pola dasar strategi yang diperlukan. Setelah pola dasar strategi dibangun, ada satu pilihan dari berbagai strategi yang tersedia, di mana pilihan tersebut dipengaruhi oleh syarat-syarat kerangka kerja, gambar target, serta tujuan-tujuan organisasi. Secara biasanya terdapat perbedaan antara strategi ofensif (menyerang) dan strategi defensif (bertahan). Strategi ofensif (menyerang) dibagi lagi menjadi strategi untuk “memperluas pasar” dan strategi untuk “menembus pasar”. Sementara strategi defensif (bertahan) menyangkut strategi untuk “mempertahankan pasar dan “menutup atau menyerahkan pasar”.

Tabel 2.1 Strategi Politik Ofensif dan Defensif Menurut Peter Schroder

Strategi Ofensif	Strategi Defensif
Strategi memperluas pasar (strategi persaingan).	Strategi mempertahankan pasar (strategi pelanggan, strategi multiplier)
Strategi menembus pasar (strategi pelanggan)	Strategi menutup/menyerahkan pasar (strategi lingkungan sekitar).

Strategi politik adalah segala rencana untuk tindakan, dimana penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi itu pada akhirnya. Dalam hal ini Schroder (2010) menjelaskan bahwa, strategi politik dibagi menjadi dua yaitu:

a. Strategi Ofensif (Menyerang)

Pada strategi ofensif (menyerang) ini yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan sebagai lembaga penyelenggara Pilkada, pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota 2024 ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah partisipasi politik melalui tindakan yang menarik dan menciptakan inovasi baru. Yang termasuk pada strategi ofensif (menyerang) yaitu “strategi memperluas pasar” dan “strategi menembus pasar”. Pada strategi ofensif (menyerang) memperluas pasar dengan melakukan strategi dengan berbagai metode yang inovatif baru dan penawaran baru baik menggunakan metode secara langsung dan tidak langsung untuk menarik dan meningkatkan partisipasi politik untuk menarik pemilih baru di samping para pemilih tradisional (tetap) yang telah ada. Pada strategi ofensif (menyerang) menembus pasar yaitu strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada KPU Kota Bekasi dan mengoptimalkan partisipasi politik pada Pilkada sebelumnya agar lebih baik lagi dengan berbagai segmen-segmen pemilih.

b. Strategi Defensif (Bertahan)

Pada strategi defensif (bertahan) ini yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan sebagai lembaga penyelenggara Pilkada, pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota 2024 ini dilakukan untuk mempertahankan mayoritas tingkat partisipasi politik yang sudah ada sekaligus menjaga kredibilitas

lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada dan menambah kepercayaan publik, strategi defensif (bertahan) yaitu “mempertahankan pasar dan menutup pasar/menyerahkan pasar. Dalam startegi defensif (bertahan) mempertahankan partisipasi politik pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi akan merawat pemilih tetap mereka dan berusaha memperkuat pemahaman, menambah kepercayaan publik para mayoritas partisipasi masyarakat yang sudah berpartisipasi aktif pada Pilkada sebelumnya agar mencegah kehilangan dan penurunan partisipasi. Adapun startegi defensif (bertahan) menutup/menyerahkan pasar yaitu bagaimana cara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi dalam menutup penyerangan-penyerangan dari pihak lain yang ingin mengacaukan jalannya Pilkada 2024 di Kecamatan Pondok Gede dengan koordinasi dengan *stakeholder* yang ada.

2.3 Partisipasi Politik

2.3.1 Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Budiarjo (2010) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang secara aktif terlibat dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup berbagai tindakan, misalnya memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri pertemuan umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau mengajukan usulan (*lobbying*) kepada pejabat

pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai politik atau gerakan sosial dan sebagiannya.

Menurut Huntington & Nelson dalam Budiarjo (2010) partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai individu (*private citizen*), dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Partisipasi ini bisa dilakukan secara individu atau bersama-sama dalam kelompok, bisa terorganisir atau spontan, bisa teratur atau sesekali, bisa dilakukan secara damai atau dengan cara keras, bisa dilakukan secara sah atau tidak sah, serta bisa berdampak besar atau tidak berdampak.

(By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective).

Menurut McClosky dalam Budiarjo (2010) seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat: Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela, di mana mereka terlibat dalam proses pemilihan pemimpin, serta secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan kebijakan umum.

(The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy).

Menurut Rush dan Althoft dalam Damsar (2010) partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan.

Dalam pernyataan di atas menurut para ahli, partisipasi politik adalah keterlibatan sukarela warga negara dalam kegiatan politik untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dan arah kebijakan publik. Partisipasi ini dapat berupa pemberian suara dalam Pemilu, keterlibatan dalam organisasi politik, aksi sosial, atau kegiatan lain yang mendukung proses demokrasi. Para ahli sepakat bahwa partisipasi politik mencerminkan kesadaran, kepedulian, dan peran aktif masyarakat dalam kehidupan bernegara, yang dapat dilakukan secara individual maupun kolektif, terorganisir maupun spontan, dengan berbagai bentuk yang sah atau tidak sah, namun tetap bertujuan mempengaruhi sistem politik dan pemerintahan.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Budiarto (2010) partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara atau dalam dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Budiarto mengklasifikasikan partisipasi politik menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1. Kegiatan Memberikan Suara

Kegiatan memberikan suara yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh warga negara yang memberikan pengaruh terhadap hasil proses pemilihan yaitu dengan datang langsung dalam proses pemungutan

suara dan memberikan hak pilihnya dan suaranya ke tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan pilihannya masing-masing. Pada Kegiatan memberikan suara dalam Pemilu dan Pilkada merupakan bentuk partisipasi politik yang paling sederhana dan paling sering dilakukan oleh masyarakat. Melalui pemberian suara, masyarakat dapat menentukan pemimpin dan wakil rakyat sesuai pilihan mereka.

2. Menghadiri Rapat Umum

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah kegiatan rapat umum bisa seperti menghadiri rapat - rapat forum diskusi tentang pemilihan kepala daerah, mengikuti kampanye dan juga sosialisasi yang di adakan oleh pasangan calon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kehadiran dalam rapat umum mencerminkan keterlibatan aktif warga negara dalam kehidupan politik, karena melalui diskusi tersebut masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, mendengarkan gagasan politik, mendengarkan gagasan visi misi dan mengetahui bagaimana proses tata cara dan jadwal penyelenggaraan Pilkada.

3. Mengadakan Hubungan (*Contacting*) atau Usulan (*Lobbying*)

Kegiatan mengadakan hubungan (*contacting*) Usulan (*lobbying*) merupakan tindakan berkomunikasi yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari calon-calon pemimpin, pejabat-pejabat pemerintah, penyelenggara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara itu sendiri. Kegiatan ini dilakukan oleh warga negara, baik secara individu dan

kelompok, dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan para calon-calon pemimpin. Cara yang digunakan adalah dengan berkomunikasi dengan memberikan usulan agar bisa menyampaikan atau menyelesaikan berbagai masalah yang dialami oleh banyak orang.

4. Menjadi Anggota Partai Politik dan Gerakan Sosial

Pada kegiatan partisipasi yang dilakukan melalui keterlibatan menjadi anggota partai politik maupun tim sukses pendukung calon tertentu, atau mengikuti gerakan sosial seperti menjadi panitia pemilihan dan relawan pemilihan.

2.3.3 Fungsi Partisipasi Politik

Di sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi, partisipasi politik warga negara bisa menjadi acuan untuk menilai apakah demokrasi tersebut berjalan baik atau belum. Partisipasi politik memiliki beberapa fungsi. Menurut Lane dalam Sahid (2011) terdapat empat fungsi partisipasi politik bagi individu, yaitu:

- a. Sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
- b. Sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sosial dalam beradaptasi.
- c. Sebagai cara untuk mengejar nilai-nilai khusus.
- d. Sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan psikologis yang ada di bawah kesadaran.

Menurut Sahid (2011) partisipasi politik juga mempunyai fungsi bagi pemerintah, fungsi tersebut diantaranya adalah untuk mendorong

program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintah.

- a. Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
- b. Sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat dapat dianggap sebagai suatu kontrol pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terjadi melalui penyampaian masukan dan kritik kepada pemerintah. Oleh karena itu, keterlibatan politik masyarakat berfungsi sebagai cara menjalankan mekanisme pengawasan terhadap pemerintah dalam implementasi kebijakan. Salah satu aspek dari orientasi politik dan perilaku individu diperoleh melalui sosialisasi politik, yang dapat diartikan sebagai pembelajaran untuk menyampaikan nilai-nilai kepada masyarakat, khususnya nilai-nilai budaya politik kepada warga negara. Pendidikan dan sosialisasi politik menggambarkan proses di mana sikap dan pola perilaku politik terbentuk dan diperoleh sebagai sarana untuk meneruskan warisan kepada generasi berikutnya untuk menciptakan budaya politik yang lebih baik.

2.3.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Lindenfield dalam Sahid (2011) faktor utama yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Menurutnya, orang yang memiliki ekonomi yang rendah cenderung merasa terasing dari kehidupan politik dan akhirnya menjadi tidak peduli. Namun, hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kondisi ekonomi yang stabil.

Sedangkan Surbakti dalam Sahid (2011) mengatakan bahwa ada dua hal penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang dalam politik. Pertama, kesadaran politik seseorang, yang mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, seperti hak politik, hak ekonomi, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, serta kewajiban lainnya. Kedua, penilaian dan sikap seseorang terhadap pemerintah, baik dalam hal kebijakan yang dikeluarkan maupun pelaksanaan tugas pemerintahannya.

Menurut Weimar dalam Sahid (2011) dijelaskan bahwa ada 5 (lima) penyebab yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam partisipasi politik, yaitu sebagai berikut:

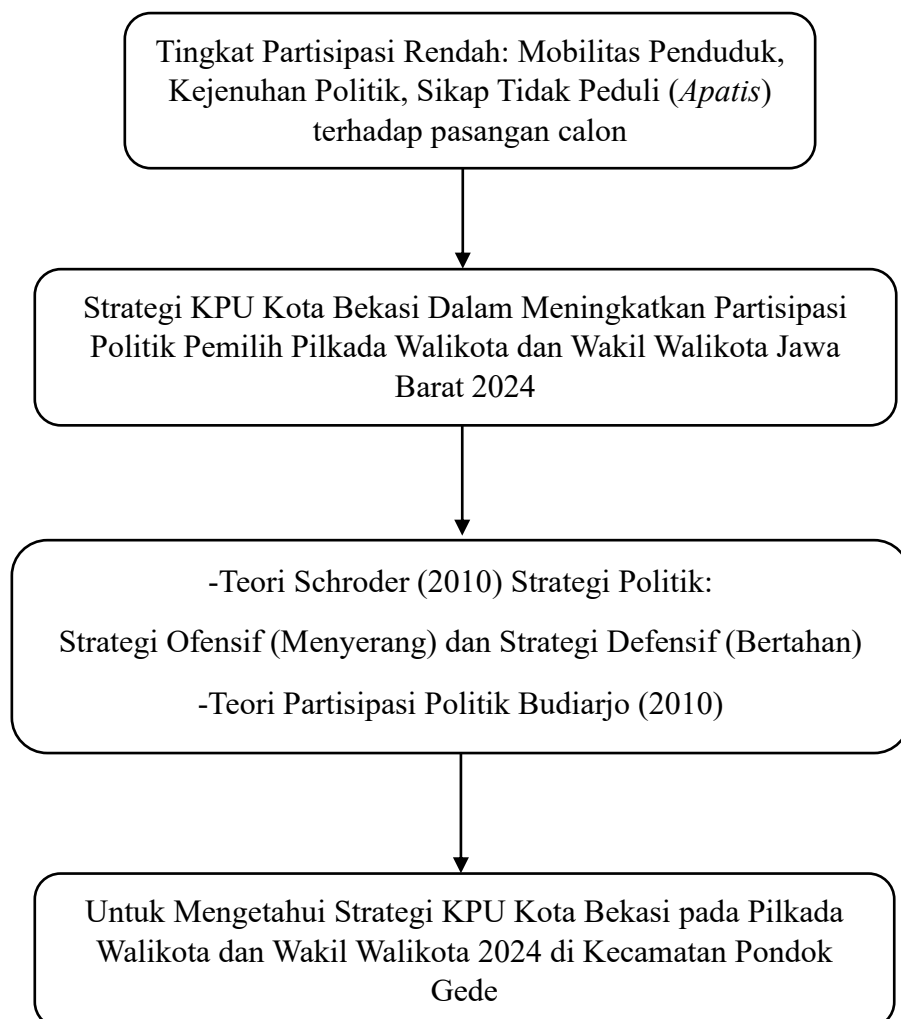
- a. Terjadi modernisasi di berbagai bidang kehidupan, sehingga masyarakat semakin banyak menginginkan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik.

- b. Terjadi perubahan struktur kelas, sehingga muncul pertanyaan siapa yang berhak ikut berpartisipasi dalam politik dan bagaimana proses pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan perubahan pola dalam cara masyarakat berpartisipasi politik.
- c. Pengaruh dari para intelektual dan komunikasi modern, membuat ide demokrasi dan partisipasi politik mulai menyebar ke negara-negara yang belum sepenuhnya mengalami modernisasi dan industrialisasi.
- d. Terjadinya konflik antar pemimpin politik, Jika terjadi pertikaian diantara para elit, maka mereka akan mencari dukungan dari rakyat. Hal ini juga memicu perjuangan kelas yang melawan kaum aristokrat, sehingga menarik perhatian buruh dan memperluas hak untuk memilih.
- e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Dari penjelasan para ahli diatas, terlihat bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi partisipasi politik warga negara. Faktor-faktor tersebut antara lain berkaitan dengan masalah ekonomi, tingkat kesadaran politik, cara masyarakat menilai kebijakan pemerintah, pengaruh dari kalangan intelektual, serta budaya politik yang ada di suatu negara.

Namun, dari semua faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang, faktor kesadaran politik merupakan faktor terpenting yang menentukan apakah seseorang akan aktif terlibat dalam kegiatan politik. Karena, jika seseorang tidak memiliki kesadaran politik yang cukup, maka sulit untuk meningkatkan partisipasi politik dalam sebuah negara. Sebab, pada dasarnya warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki pemahaman dan kesadaran tinggi terhadap perkembangan politik di negaranya.

2.4 Kerangka Pemikiran



Rendahnya partisipasi politik pemilih pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota 2024 di kecamatan Pondok Gede yaitu, Mobilitas penduduk, dimana perpindahan penduduk tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti pendidikan, pekerjaan dan hal lain. Dalam perpindahan tersebut masyarakat tidak mengurus perpindahan pemilih karena masi terikat oleh daerah asal dan masyarakat banyak yang tidak memahami prosedur pindah pemilih tersebut yang mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suara, Kejenuhan politik, kondisi ini muncul akibat masyarakat yang terus-menerus terlibat dalam berbagai kegiatan politik, karena masyarakat sudah merasa lelah menghadapi tahapan Pemilu yang terjadi sebelum Pilkada, minat dan antusiasme untuk ikut serta berpartisipasi dalam Pilkada menurun. Sikap tidak peduli (*apatis*) di karenakan ketidakpahaman terhadap pasangan calon dan pasangan calon yang tidak menarik pada Pilkada 2024 di Kecamatan Pondok Gede. Dalam hal tersebut tentunya, Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan baik Pemilu dan Pilkada memiliki strategi dalam meningkatkan partisipasi politik. Dalam memperdalam permasalahan tersebut pada penelitian ini menggunakan teori strategi politik Schroder (2010) strategi ofensif (menyerang) strategi defensif (bertahan) dan menggunakan teori partisipasi politik Budiarjo (2010) untuk mengetahui partisipasi poilitik masyarakat Kecamatan Pondok Gede. Dalam hal ini, untuk mengetahui straegi yang di lakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota 2024 di Kecamatan Pondok Gede kota Bekasi.